

# MANIFESTO POLITIK

## GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

### 1. Asas Perjuangan

#### 1.1 Marhaenisme

Marhaenisme yang dijadikan sebagai asas, asas perjuangan, dan strategi perjuangan GMNI mengandung 3 (tiga) nilai-nilai dasar yaitu: sosio-nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### a. Sosio-Nasionalisme

Sosio-nasionalisme adalah satu asas kehidupan rakyat Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia muncul dan tumbuh atas kesadaran sejarah ketertindasan bangsa oleh kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu nilai-nilai yang dianut oleh nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai kebangsaan yang menginginkan penegakan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, *zonder exploitation de nation par nation dan zonderexploitation de nation par nation*, dan bersifat melindungi serta menyelamatkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, dan bertindak berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Sosio-nasionalisme adalah ide yang dijadikan sebagai asas pergaulan hidup rakyat dan bangsa Indonesia, yang dilandasi oleh semangat cinta terhadap manusia dan kemanusiaan. Sosio-nasionalisme adalah ide tentang sebuah susunan masyarakat Indonesia yang tidak *chauvinist* melainkan humanis, tegas, dan revolusioner terhadap segala bentuk penindasan yang

dilakukan oleh feodalisme, kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme sebagai sebuah kesadaran dan keharusan sejarah (*historische notwendeigheti*).

## **b. Sosio-demokrasi**

Sosio-demokrasi adalah asas kehidupan rakyat Indonesia yang memiliki 2 (dua) makna demokrasi yaitu: demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik adalah sistem kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia yang memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak mengabdikan pada segolongan masyarakat. Demokrasi politik Indonesia adalah demokrasi yang memberikan hak penuh kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai entitas merdeka untuk mengartikulasikan seluruh kemerdekaan politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi politik Indonesia mengedepankan nilai-nilai solidaritas kebangsaan daripada kepentingan individu, kelompok, maupun golongan.

Demokrasi ekonomi adalah bangunan sistem perekonomian nasional yang berpijak pada fondasi nilai-nilai ideologi, di mana manusia Indonesia menjadi sebuah pribadi (*entity*) bebas yang hak dan kewajibannya diletakkan di dalam suatu kepentingan bersama. Setiap warga negara berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan bebas berusaha demi perkembangan kemanusiaannya. Dasar penyusunan perekonomian nasional juga harus didasarkan pada upaya mewujudkan nilai-nilai (asas) kekeluargaan, yang kemudian oleh Bung Karno dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk ekonomi koperasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) utama dalam perekonomian nasional. Sebab koperasi adalah sebuah badan hukum yang mampu mengintegrasikan sistem kepemilikan privat dalam naungan kebersamaan.

### **c. Ketuhanan Yang Maha Esa**

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah asas kehidupan rakyat Indonesia yang berketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia karena setiap nilai-nilai Ketuhanan (agama) akan mengajarkan kepada rakyat tentang hakikat kemanusiaan dan budi nurani manusia Indonesia. Nilai-nilai Ketuhanan tersebut diletakkan dalam Ketuhanan yang berkebudayaan, yang meletakkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan cara saling hormat-menghormati sesama pemeluk agama.

## **2. Konsep Perjuangan**

### **2.1 Dasar dan Tujuan GMNI**

Dasar Perjuangan GMNI adalah terciptanya keadilan sosial dalam kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan berdaulat. Setiap individu masyarakat Indonesia merupakan entitas merdeka yang berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan bebas berusaha demi perkembangan kemanusiaannya. Atas dasar dan tujuan perjuangan tersebut maka kehidupan kebangsaan Indonesia harus dibangun dalam konstruksi kehidupan negara bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

**Berdaulat di bidang politik** diletakkan dalam kerangka negara bangsa yang mengabdikan kepada rakyat dengan kewajiban melindungi segenap kehidupan rakyat Indonesia dari segala bentuk penindasan dan pengisapan. Oleh karena itu, negara tidak boleh terikat maupun tergantung dengan kekuatan lain (negara asing, modal, militer, dan lain-lain). Negara hanya

tunduk kepada kedaulatan rakyat dan mengabdikan kepada rakyat.

**Berdikari di bidang ekonomi** diletakkan dalam kerangka negara bangsa yang mendasarkan perekonomiannya pada potensi bangsa (ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam, dan lain-lain) tanpa tergantung dengan kekuatan lain (modal dan negara asing). Susunan perekonomian Indonesia juga harus didasarkan pada nilai-nilai (asas) kekeluargaan yang mengintegrasikan sistem kepemilikan privat dalam naungan kebersamaan (*the variants of private ownership include individual, partnership, cooperative and enterprise*).

**Berkepribadian di bidang kebudayaan** diletakkan dalam kerangka negara bangsa yang mendasarkan pergaulan hidupnya pada budaya bangsa sendiri. Budaya bangsa adalah bangunan karakter kebangsaan rakyat Indonesia dalam semangat persatuan (nasionalisme) yang sadar sejarah, humanis, dan percaya kepada kekuatan diri sendiri (*self-reliance*).

## **2.2 Dasar Revolusi GMNI**

Dasar revolusi GMNI adalah marhaenisme yaitu: **sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa** sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

### **2.2.1 Kewajiban Perjuangan GMNI**

- a. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran akan sebuah revolusi dalam upaya mencapai sebuah tujuan perubahan yang lebih baik;
- b. Melakukan penyadaran kelas kepada seluruh rakyat tentang sejarah ketertindasan bangsa sampai saat ini;
- c. Membangkitkan perlawanan rakyat terhadap segala bentuk-bentuk

- penindasan dan pengisapan;
- d. Membangun nilai-nilai kegotong-royongan sebagai manifestasi cita-cita kehidupan negara bangsa;
  - e. Membangun progresifitas-revolusioner gerakan sebagai alat percepatan menuju cita-cita Sosialisme Indonesia.

### **2.2.2. Kekuatan Perjuangan GMNI**

#### **a. Kaum Marhaen Indonesia**

Kaum marhaen Indonesia adalah potensi kekuatan sosial bagi perjuangan GMNI yang akan menjadi barisan pelopor perwujudan cita-cita Sosialisme Indonesia. Sebab kaum marhaen adalah kaum yang mengerti, memahami, dan mengalami secara langsung tentang ketertindasan dan pengisapan.

#### **b. Kaum Marhaenis Indonesia**

Kaum marhaenis Indonesia adalah kekuatan yang akan mengawal kaum marhaen Indonesia dalam sebuah gerakan perlawanan bersama-sama menuju cita-cita Sosialisme Indonesia. Kaum marhaenis akan bersatu bahu membahu bersama kaum marhaen membuka jalan perubahan dalam setiap kerangka revolusi.

#### **c. Pembukaan UUD 1945 dan Revolusi 1945**

Pembukaan UUD 1945 adalah *declaration of independence* bangsa yang menjadi *philosophisce grondslag* rakyat Indonesia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur tentang dasar kemerdekaan dan cita-cita kehidupan rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 akan menjadi landasan pijak perjuangan rakyat Indonesia menuju cita-cita Sosialisme Indonesia.

Revolusi 1945 adalah potensi pendukung yang akan membantu terwujudnya Sosialisme Indonesia. Sebab revolusi 1945 telah menyelesaikan kerangka revolusi pertama yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jika dalam perkembangan kehidupan kebangsaan Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan negara kembali terjajah oleh kekuatan neoliberalisme maka sudah menjadi kewajiban bagi GMNI untuk mengembalikan kedaulatan dan kemerdekaan tersebut atas nama jiwa revolusi rakyat Indonesia.

#### **d. Konsentrasi Kekuatan Nasional Indonesia**

Konsentrasi (persatuan) kekuatan nasional Indonesia diperlukan sebagai alat untuk melakukan perlawanan secara bersama-sama terhadap kapitalisme global (neokolonialisme dan imperialisme). Jika perlawanan dilakukan dalam kondisi parsialitas kekuatan nasional, maka akan menyulitkan jalannya revolusi Indonesia. Oleh karena itu maka perlawanan terhadap kekuatan kapitalisme global harus tetap dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh seluruh elemen-elemen bangsa. Sehingga segala bentuk perbedaan antar elemen bangsa harus dikesampingkan atas nama persatuan dan kesatuan perlawanan bangsa terhadap kekuatan kapitalisme global tersebut.

#### **e. Letak geografis Indonesia yang strategis**

Sebagaimana diakui oleh sejarah bangsa-bangsa di dunia, Indonesia memiliki potensi letak geografis yang strategis baik dalam percaturan politik internasional maupun perekonomian dunia. Dan potensi itulah yang mengakibatkan sejarah ketertindasan yang cukup panjang yang dialami oleh rakyat Indonesia sampai detik ini. Mengingat potensi strategis di mana bangsa-bangsa dunia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap

keberadaan Indonesia, maka potensi tersebut harus diproteksi guna melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman penindasan dan pengisapan. Sebaliknya, potensi tersebut harus digunakan sebagai *bargaining* terhadap dunia internasional untuk membangun hubungan internasional yang lebih baik dalam kerangka perdamaian abadi, bukan penindasan sesama bangsa.

#### **f. Percaya pada Kekuatan Bangsa Sendiri**

Kepercayaan pada kemampuan dan keuletan bangsa sendiri (*self-reliance*) penting untuk membangun semangat perjuangan rakyat Indonesia yang sedang menjalankan revolusinya. Sejarah telah membuktikan tentang kejayaan tersebut khususnya pada masa-masa kerajaan Hindustan beberapa abad yang lalu di mana bangsa ini telah menunjukkan kekuatannya kepada dunia.

### **2.2.3 Syarat Revolusi Perjuangan GMNI**

#### **a. Progresif Revolutioner**

Progresif dimaknai sebagai sebuah perubahan yang berlangsung terus menerus, sebuah perubahan dari kuantitatif menuju kualitatif (dialektika perubahan). Revolutioner dimaknai sama dengan makna "radikal" yaitu mencapai perubahan secara cepat (*omvormend in snel tempo*). Sehingga dapat diartikan bahwa revolusi Indonesia harus dilakukan secara cepat dan dipercepat serta terus-menerus (permanen), sebagaimana sejarah yang terus merevolusi dirinya.

## **b. Radikal**

Radikal adalah semangat perubahan yang harus dilakukan secara cepat dengan mendobrak segala bentuk penindasan demi percepatan revolusi Indonesia.

## **c. Dialektis**

Dialektis adalah syarat yang mewajibkan revolusi Indonesia atas dasar hukum dialektika sejarah. Sebuah hukum yang mempelajari sebab akibat terjadinya perubahan sejarah yang akan memberikan arah perubahan pasti bagi cita-cita revolusi Indonesia.

## **d. Kritis**

Kritis adalah sikap dan cara berpikir rakyat Indonesia dalam menjalankan revolusi Indonesia. Sikap dan cara berpikir kritis tersebut adalah sikap dan cara berpikir yang tidak puas dan tidak percaya terhadap segala bentuk kebijakan dan sistem yang ada. Sebuah sikap dan cara berpikir yang terus mengkaji dan menilai setiap kebijakan dan sistem yang timbul dalam sejarah perkembangan masyarakat sehingga mampu menilai tentang keadaan dan kebenaran dari setiap perubahan yang terjadi, dan mampu memperbaikinya dalam sebuah perubahan untuk menuju sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik.

## **e. Mandiri**

Mandiri adalah sikap revolusi Indonesia yang tidak tergantung oleh kekuatan lain selain kekuatan nasional, kekuatan seluruh rakyat Indonesia. Mandiri adalah sikap revolusi yang tidak tunduk pada kemauan siapa pun kecuali kemauan seluruh rakyat Indonesia yang didasarkan pada tuntutan budi nurani.

#### **f. Gotong Royong**

Gotong royong adalah kehidupan revolusi Indonesia yang meletakkan entitas manusia Indonesia yang bebas merdeka di atas kepentingan bersama yang berdasarkan pada nilai-nilai solidaritas kebangsaan (kekeluargaan).

#### **g. Kemanusiaan**

Kemanusiaan adalah jiwa dan roh revolusi Indonesia yang menginginkan sebuah perubahan menuju kehidupan yang berdasar atas dasar-dasar perikemanusiaan *zonderexploitation de l'homme par l'homme*.

#### **h. Religius**

Religiusitas masyarakat Indonesia adalah alat untuk membangun kesadaran revolusi yang didasarkan atas tuntutan budi nurani manusia, yang mana tuntutan budi nurani tersebut merupakan inti dari nilai-nilai ajaran agama yang dianut dan diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia.

### **2.2.4 Musuh-musuh Perjuangan GMNI**

#### **a. Neokolonialisme dan Neoimperialisme**

Neokolonialisme sebagai fenomena pasca Perang Dunia II berkembang dalam kedok pemberian kemerdekaan bagi negara-negara jajahan, namun kedaulatannya tetap di bawah kekuatan politik negara penjajah. Bahkan dalam perkembangan terakhir, selain dengan menggunakan kekuatan modal dan jebakan hutang, negara-negara maju dalam upaya menjajah negara-negara dunia ketiga adalah dengan menggunakan kekuatan militer terselubung dengan kedok penegakan hak asasi manusia dan penjaga perdamaian dunia. Namun di balik semua kedok tersebut, kepentingan yang diharapkan dari pengerahan kekuatan militer tersebut adalah penguasaan

sumber daya alam milik negara-negara dunia ketiga khususnya sumber daya alam yang menyangkut energi. Sebab energi (minyak) saat ini menjadi pemegang kekuatan utama negara-negara maju untuk menggerakkan mesin-mesin industri yang memproduksi barang.

### **b. Feodalisme Bangsa**

Dalam kesejarahan bangsa di seluruh wilayah nusantara, kaum marhaen Indonesia telah diperintah oleh raja-raja kerajaan Hindustan dalam tatanan kehidupan feodal. Kaum marhaen hanya menjadi alat kepuasan para raja dengan segala bala keningatannya. Kaum marhaen tidak memiliki hak menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*). Akibat sistem feodalisme yang berlangsung selama berpuluh-puluh abad tersebut telah membentuk mental masyarakat Indonesia yang lemah, tidak percaya diri (*minder*), sungkan dan ewuh pekewuh terhadap kelas yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih tinggi. Mental-mental warisan feodalisme tersebut adalah faktor penghambat terwujudnya revolusi Indonesia karena kontradiktif dengan syarat-syarat revolusi yang menginginkan kemajuan bersifat progresif, revolusioner, radikal, dan kritis.

### **c. Kekuatan Kontra Revolusi**

Kekuatan kontra revolusi yang menjadi musuh utama GMNI adalah: kaum kapitalis, tuan-tuan tanah (*land lords*), para komprador, kaum federalis yang menginginkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaum ortodoks, konservatif, kaum doktriner formalistik (otoriter), kaum oportunis, dan politisi-politisi korup serta spekulasi-spekulasi ekonomi yang selama ini telah menjadi para pelaku yang membawa bangsa ini dalam kungkungan kekuatan kapitalisme global.

### **3. Strategi dan Taktik GMNI**

Setelah hampir satu abad kelahiran marhaenisme, sejarah membuktikan bahwa marhaenisme ternyata masih mampu menjadi satu ideologi yang *survive*, walaupun tiga dekade sempat di berangus rezim tirani militeristik. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab GMNI sebagai salah satu kekuatan yang masih meyakini dan memegang teguh cita-cita marhaenisme, untuk kembali melanjutkan jalannya revolusi demi memanifestasikan nilai-nilai marhaenisme tersebut dalam sendi-sendi kehidupan rakyat.

#### **3.1 Taktik dan Strategi Perjuangan Politik**

##### **3.1.1 Strategi**

###### **a. Ideologisasi, Gerakan Intelektual, dan Masifikasi Gerakan**

Dalam perspektif ideologis, neoliberalisme diakui telah memaksa negara Indonesia menjadi subordinat (antek) kekuatan kapitalis global. Padahal dalam asas perjuangan, negara diberikan peran dan kepercayaan yang sangat besar sebagai alat pemersatu, pelopor revolusi sosial, dan panglima penegak keadilan dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berjalan. Distorsi peran negara sebagai subordinat kekuatan kapitalis global, yang melanda seluruh negara-negara dunia, memaksa GMNI untuk merumuskan kembali tentang peran negara dalam keikutsertaannya mewujudkan revolusi sosial di Indonesia. Namun yang pasti, bahwa terlalu sulit bagi GMNI untuk mengandalkan negara sebagai alat perlawanan terhadap kapitalisme global dalam kondisi ketergantungan seperti saat ini.

Ideologi di fungsionalisasikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat yang tertindas, baik secara kultural maupun politik. Ideologi menuntut seorang cendekiawan untuk memihak. Bagi seorang ideolog, ideologinya adalah suatu kepentingan yang mutlak. Setiap ideologi memulai dengan tahap kritis, kritis terhadap *status quo*, kritis terhadap masyarakat dengan berbagai aspek kultural, ekonomi, politik, dan moral yang cenderung melawan perubahan-perubahan yang diinginkan. Berbeda dengan filsafat maupun ilmu yang sama sekali tidak mempunyai komitmen seperti itu, ia hanya menggambarkan realitas seperti apa adanya dengan tidak membedakan apakah ia menolak atau menerima realitas tersebut. Inilah perbedaan yang mencolok antara ilmu, filsafat dan ideologi. Dengan kata lain, agar ideologi mampu memosisikan dirinya menjadi landasan perjuangan, maka keberpihakannya harus jelas. Pada wilayah politik, ia harus mengabdikan sehingga mampu memberikan doktrin-doktrin politik.

Sejarah mencatat bahwa garis perjuangan keorganisasian GMNI telah melakukan upayanya dalam pembentukan kader progresif revolusioner. Kader dijadikan sebagai tangan utama organisasi dalam melakukan perwujudan cita-cita tersebut. Sebagai organisasi gerakan kemahasiswaan, GMNI tentunya memiliki tujuan sebagai arah organisasi. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar GMNI.

Kader sebagai sumber daya yang harus digunakan untuk pencapaian suatu tujuan atau target organisasi. Diakui atau tidak bahwasanya hampir semua elemen pergerakan telah sepakat bahwa dunia pergerakan di tingkatan kampus akhir-akhir ini mengalami kemunduran, entah hal itu di tataran kualitas ataupun kuantitas.

Perasaan gelisah kader-kader yang ada terasa tidak bisa maksimal dalam menjalani dan menuangkan idenya untuk membesarkan nama

organisasinya. Terkadang kegelisahan tersebut seolah menjadi penyakit yang membuat minder dan pesimis untuk melakukan langkah-langkah awal, karena tidak dapat dipungkiri budaya-budaya materialistik, hedonis, dan kapitalis telah memberikan pergeseran paradigma dan makna hidup. Hidup yang dijalani tidak lagi memberikan efek sosial untuk memberikan perubahan di tataran masyarakat. Namun kini yang ada di benak kita adalah bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan sendiri dahulu, masalah orang lain biar diatur masing-masing (krisis kesadaran akan tanggung jawab). Pemikiran seperti ini, kami rasa telah ada di benak setiap orang yang telah terjangkit virus MHK (materialistik, hedonis, dan kapitalis) tersebut.

Dari beberapa kegelisahan di atas, pemasifan gerakan perlu direalisasikan sebagai upaya untuk mewujudkan visi-misi GMNI sebagai organisasi. Karena dengan begitu akan muncul adanya gerakan, sehingga tidak hanya sebatas idealisme yang mengawang-awang tanpa adanya aplikasi, dan tentunya aktualisasi yang dilakukan tanpa lepas dari pedoman organisasi.

Masifikasi gerakan juga harus ditopang dengan kajian yang dibangun di atas dua fungsi kerja yaitu internal dan eksternal. Kajian internal fokus membahas hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu internal organisasi baik itu yang berkaitan dengan kepengurusan, evaluasi pengaderan, *management upgrading* kepengurusan, serta kajian-kajian yang bersifat internal lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan potensi kader yang bermuara pada prestasi organisasi. Kajian eksternal difokuskan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan eksternal seperti persoalan kampus, isu-isu kedaerahan, maupun isu-isu nasional yang irisannya sampai ke daerah. Hal ini penting di samping untuk meningkatkan prestise, juga dalam rangka mengatur regulasi isu yang berkembang sehingga terinventarisasi secara baik dan secara tidak langsung akan menjadi

penopang kuat eksistensi organisasi di tingkat publik.

## **b. Advokasi Kebijakan dan Pengorganisasian Rakyat**

GMNI kemudian secara institusional mengambil strategi sebagai—oposisi permanen (deklarasi Lembang 2001) terhadap negara. Hal ini penting dilakukan, sebab negara sampai saat ini dipandang sebagai representasi rakyat dalam konstitusi kita, di mana keselamatan dan nasib rakyat Indonesia berada di tangan negara. Namun di satu sisi, justru negara acapkali mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Unsur-unsur yang mempengaruhi negara antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan partai politik.

Untuk itu maka dalam kerangka non-kooperatif GMNI dituntut melakukan upaya penetrasi kebijakan melalui agitasi dan propaganda terhadap kekuasaan dari tingkat pusat sampai daerah demi terwujudnya sistem yang mendukung nilai-nilai ideologi. Dalam upaya nonkooperatif pula, GMNI harus mampu mengontrol jalannya kebijakan kekuasaan secara langsung dengan cara massa aksi, melalui aksi penolakan bersama-sama kekuatan rakyat. Dalam kerangka massa aksi tersebut, GMNI dituntut untuk terus melakukan penyusunan kekuatan (*machtvorming*) dengan cara pengorganisasian rakyat yang dilakukan secara holistik dan integratif. Dan berdasarkan silabus kaderisasi, setiap kader GMNI memiliki tanggung jawab pengorganisasian rakyat tersebut dengan cara memasuki sentra-sentra komunitas untuk membangun simpul-simpul komunitas.

GMNI harus mampu mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi tersebut sering kali berwujud kebijakan publik yang dibuat oleh penguasa. Kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan

kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan mengharuskan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di tengah kekuasaan yang cenderung sentralistik dan selalu memainkan peranan dalam proses kebijakan.

Dengan demikian, **GMNI harus melakukan pengorganisasian rakyat di tengah situasi yang dihadapi rakyat dan bagaimana menyelesaikannya.** Pengorganisasian rakyat merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan secara bersama-sama agar memahami masalah yang dihadapi, menganalisis masalah tersebut, merancang penyelesaian secara bersama-sama, dan kemudian juga melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika proses tersebut dilakukan secara terus menerus maka akan ada kondisi di mana rakyat yang kuat, mempunyai kesadaran kritis.

Pengorganisasian rakyat yang kuat dan mempunyai kesadaran kritis akan melahirkan keadaan di mana rakyat akan mendukung gerakan-gerakan GMNI yang dianggap berkesinambungan dengan kepentingan rakyat, sehingga dalam kondisi tersebut akan tampak bahwa GMNI bersama rakyat. Dengan demikian pengorganisasian rakyat dan advokasi sebenarnya merupakan sebuah paket yang harus terus dilakukan dalam menciptakan keberdayaan rakyat. Keberdayaan rakyat yang dicapai dengan pengorganisasian rakyat dan advokasi harusnya juga didukung dengan perluasan jaringan agar proses yang kita lakukan mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga semakin menguatkan rakyat. Keberdayaan bukanlah sebuah utopia jika pengorganisasian rakyat, advokasi, dan penguatan jaringan terus-menerus dilakukan.

### **c. Teknologi Sebagai Alat Perjuangan**

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Pengaruh globalisasi, sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi karena banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam negara dan bangsa kita.

Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini, di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang di anut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan (modernisasi). Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon dan telepon genggam (HP), bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa.

GMNI harus hadir dalam hal ini melakukan gerakan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat agar mampu menjadi bagian yang bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat Indonesia.

### **d. Pembangunan Blok Politik Demokratis**

Kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Surbakti, 2007: 144). Sebagai warga negara yang berdaulat, paling tidak ada dua hal mendasar yang harus disadari masyarakat yaitu hak dan kewajibannya. Sering kali masyarakat hanya menuntut haknya namun abai terhadap kewajibannya. Untuk itu, perlu ada upaya untuk

memberi penyadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam konteks memberikan perubahan agar masyarakat Indonesia menjadi bagian yang berdampak baik terhadap sekitar terlebih masyarakat luas pada umumnya.

### **3.1.2 Taktik**

Taktik yang dilakukan dalam perjuangan oleh GMNI adalah:

- a) Propaganda ideologis.
- b) Penguasaan ruang publik dalam melakukan agitasi dan propaganda gerakan.
- c) *Statement*.
- d) Kaderisasi.
- e) Diplomasi tanpa kekerasan (*nonviolence*).
- f) Kontra-hegemoni.
- g) Inklusifitas gerakan (aliansi taktis dan strategis).
- h) Pendampingan.